



# Dana Hibah DKI Tak Bisa Dicairkan

**JAKARTA** – Empat daerah mitra DKI Jakarta terpaksa harus gigit jari. Mereka tidak bisa mendapatkan kucuran dana hibah karena belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana hibah tahun kemarin. Empat daerah tersebut yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Hanya Kabupaten Tangerang yang dana hibahnya bisa dicairkan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, kemarin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 yang telah disahkan Rp73,08 Triliun telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikoreksi selama seminggu. Terkait dana hibah, Heru menjelaskan, hingga Sabtu (31/1) empat kota mitra yang telah mendapatkan dana hibah pada 2014 belum juga menyerahkan LPj.

Akibat itu, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mencairkan dana hibah kepada empat kota tersebut. Mereka baru bisa mendapatkan dana hibah melalui APBD Perubahan 2015 dengan syarat harus mengajukan perencanaan penggunaan dana hibah misalnya pelebaran jalan. Apakah sudah ada trasenya, bagaimana konsep pembebasan lahannya, dan sebagainya.

"Mereka sudah telat memberi LPj dana hibah tahun lalu. Sekarang APBD sudah di fase Kemendagri. Kami kan manajemen keuangan negara, yang diperiksa kami. Makanya, kami minta LPj-nya," katanya di Balai Kota kemarin.

tak terduga," ungkapnya.

Mantan wali kota Jakarta Utara itu menuturkan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan dana hibah dalam APBD 2015 sebesar Rp3,069 triliun. Rinciannya Pemkab Bogor Rp100,407 miliar, Pemkot Bekasi Rp200,018 miliar, Pemkot Tangerang Rp2,436 miliar, Pemkot Tangerang Selatan Rp164,8 miliar, dan Pemkab Tangerang Rp167,94 miliar. Hanya hibah bagi Kabupaten Tangerang yang nanti bisa dicairkan Rp17,7 miliar.

Pemkot Bekasi segera mengklarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dana hibah tersebut. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan, penggunaan dana hibah 2014 akan dipertanggungjawabkan. Namun, saat ini Pemkot Bekasi masih terganjal dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LPj

Heru menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah memanggil pimpinan empat kota mitra tersebut. Mereka bertemu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), namun tidak membawa apa-apa. Misalnya soal pelebaran jalan 10 meter-20 meter, trasenya belum ada, serta tanda tangan dinas tata ruang dan wali kota tidak ada. Alasannya, mereka sibuk mengurus pembangunan sehingga belum dapat menyusun LPj.

Sesuai Pasal 19 ayat 1 Peraturan Kemendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pengguna harus bertanggung jawab secara formal dan material atas dana cuma-cuma tersebut. "Kalau mereka meng-

ajukan rancangan penggunaan dana hibah dan LPj tahun lalu, kami akan mengalokasikannya dalam APBD Perubahan 2015 yang dimasukkan dalam biaya akan segera diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta jika audit sudah selesai.

"Dana hibah tersebut sudah tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan penanggulangan banjir di wilayah perbatasan antara DKI dan Kota Bekasi," ungkapnya.

Bagi Pemkab Bogor, tidak cairnya dana hibah membuat sejumlah program yang berkaitan dengan permasalahan banjir dan tata ruang di kawasan Bogor terganjal. Salah satunya lanjutan pembongkaran vila untuk mengembalikan daerah resapan air di kawasan Puncak terancam terhenti. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bogor Wawan Sidik mengakui, terganjalnya pencairan dana bantuan hibah lantaran pihaknya belum memberikan LPj hibah tahun lalu.

● **bima setiyadi/haryudi/abdullah m surjaya**